

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurahman, *Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- Alting, Husen, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Yogyakarta, Rineka Cipta, 2009.
- Arizona, Yance, *Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend Legislasi Nasional Tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jakarta, Epistema Institute, 2010.
- Auriga, Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kerentanan Korupsi Dalam Sistem Perizinan Perkebunan Sawit: Studi Kasus di Provinsi Papua dan Papua Barat*. Jakarta. Auriga Nusantara. 2022.
- Boelaars, Jan, *Manusia Irian Dahulu Sekarang Masa Depan*, Jakarta, Gramedia, 1986.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung, Revika, 2018.
- Efendi, A'an, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Farmer, Andrew, *Handbook of Environmental Protection and Enforcement: Principles and Practice*, London Sterling, VA: Earthscan, 2007.
- Friedman, Lawrence M, *American Law: An Introduction*, Terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta, Tatanusa, 2001.
- Greenpeace, *Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua*, Az: Amsterdam, Greenpeace International, 2021.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Nasional Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Jambatan, 2003.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2006.

Irianto, Sulistyowati, Jan Michiel Otto, Sebastiaan Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, Julia Arnscheidt, *Kajian Sosio-Legal*. Pustaka Larasan, 2012.

Kartasapoetra, G, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, Bina Aksara, 1985.

Koalisi, Selamatkan Hutan Adat Papua, *Suku Awyu: Menggugat Negara Membela Hutan Adat*, Jakarta, Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.

Muhammad, Buhar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1991.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram, University Press, 2020.

N.D. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2008.

Rato, Dominikus, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2011.

Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Banjarmasin, Antari Press, 2011.

Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia*, Medan, CV Nuansa Aulia, 2013.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana, 2020.

Sumardjono, Maria S.W., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2021.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Pancuran Alam, 2006.

Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Adat Dalam: Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2014.

Syamsudin, M, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta, Kencana, 2021.

Soesanggobeng, Herman, *Filosofis Asas Ajaran Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*. Yogyakarta, STPN Press, 2012.

Tamsil, *Kajian Hukum Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Tumpang Tindih Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sari Persada Raya Dengan kawasan Hutan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)*, Palembang, The Asia Foundation, 2018.

Tim, Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647).

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23).

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Mei 2013.

Makalah, Artikel, dan Jurnal:

Andiki, Febri, Sukirno, Adya Paramita. Peralihan Hak Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharma Raya. *Notarius*. 12. No. 2. (2019): 861.

Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Boven Digoel Dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Boven Digoel. Boven Digoel 2023.

_____, *Distrik Mandobo Dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Boven Digoel. Boven Digoel 2023.

_____, *Distrik Fofi Digoel Dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Boven Digoel. Boven Digoel 2023.

Bosko, Rafael Edy, Reconsidering the Inalienability of Communal Ulayat Rights: Theoretical Overview, *Proceeding*, The 9th ALIN Expert Forum Land Rights Law in Asian Countries on June 12th, 2014 at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

Dewan Kehutanan Nasional Dan UN-REDD Programme Indonesia, *Rekomendasi Kebijakan: Instrument Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak Dalam Aktivitas REDD+ Di Indonesia*, Jakarta, Dewan Kehutanan Nasional, 2011, hlm. 3.

Cahyaningrum, Dian, Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi, *Negara Hukum*. 13. No.1. (2022): 30.

Purnama, Erwin Nugraha, Kismartini, dan Retno Sunu Astuti, “Peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Marind Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kota Merauke”. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 6. No. 6. (Juni 2021): 2799. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.2916>.

Putri, Karina Dwi Nugrahati, Sartika Intaning Pradhani, Hendry Julian Noor, “The Existence of Adat Law Community in Public-Private Partnership”. *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. 9. No. 3. (2020). hlm. 308. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3.25492>

Sabardi, Lalu, “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 2, No.43. (April-Juni 2016): 174. DOI: [10.21143/jhp.vol44.no2.19](https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.19).

Santoso, Urip, Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional, *Mimbar Hukum*. 24. No.2. (Juni 2012): 278.

Sari, Almonika Cindy Fatika, Sartika Intaning Pradhani, Tody Sasmita Jiwa Utama. Pelepasan Hak Adat atas Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat Papua: Studi Putusan Pengadilan. *Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*. Vol. 14. (2021): 53.

Tanjung, Albert, “Kedudukan Hutan Adat Di Atas Tanah Ulayat Dalam Pemanfaatan Hutan”. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. 4. No. 1. (April 2019): 142. DOI: <https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i1.590>.

Wiyono, Bambang, “Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia”, *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah hukum dan Keadilan*. 6, No.1 (Juli 2019): 676-677, DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v6i1.y2019.3036>.

Skripsi, Tesis, dan/atau Disertasi:

Bachtiar, Nur Annisa, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Tradisional Di Hutan Laposo Niniconang Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng”, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2020.

Gunawan, Sahrul, “Analisis Hukum Hak Masyarakat Adat Ammato Terhadap Hutan Adat Di Kabupaten Bulukumba”, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2022.

Supriyanto, Heroe, “Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Ulayat Untuk Perkebunan Sawit Di Nagari Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan”, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2019.

Internet:

Boven Digoel, https://www.bovendigoelkab.go.id/halaman/pariwisata_kebudayaan (diakses 14 Desember 2023).

Jaring Nusa, Pentingnya Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat, <https://jaringnusa.id/pentingnya-pemetaan-partisipatif-wilayah-adat/> diakses 17 Februari 2024.

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, <https://pusaka.or.id/sidang-gugatan-lingkungan-ptun-jayapura-masyarakat-adat-merasa-tertekan-dan-terpaksa/>, diakses 10 Agustus 2023.